

BUPATI PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 511.2/392/KPTS/PM/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULUS BAGI PEDAGANG SAYUR MASAK DI BANGUNAN LAPAK LOKASI PASAR CBD GOTALAMO KECAMATAN MOROTAI SELATAN

BUPATI PULAU MOROTAI.

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya fenomena penyebaran *Virus Corona Disease* 2019 di Provinsi Maluku Utara cenderung meningkat dari waktu ke waktu menimbulkan dampak pada perekomian masyarakat terutama bagi para pedagang yang berada di kawasan pasar CBD;
 - b. bahwa menindaklanjuti angka 3 dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3929/SJ, tanggal 18 Juli 2021 tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat, diminta kepada bupati agar membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulus bagi Pedagang Sayur Masak Di Bangunan Lapak Di Lokasi Pasar CBD Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disaese 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 32);
- 15. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tim Cipta Lapangan Kerja (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 03);
- 16. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2020 Nomor 24);
- 17. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 06).

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3929/SJ, tanggal 18 Juli 2021 tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat.
 - 2. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 443/199/KPTS/PM/ 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021;
 - 3. Keputusan Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Pulau Morotai Nomor 443/13/SATGAS C-19/ VII/2021 tentang Satuan Tugas Khusus Percepatan, Penanganan, Pengendalian Dan Pemulihan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Penetapan Penerima Bantuan Stimulus dana dan besaran dana bagi

Pedagang Sayur Masak yang menempati Lapak di Lokasi Pasar CBD Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan sebagaimana data dalam

lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Stimulus Bantuan bagi Pedagang Sayur Masak sebagaimana Diktum

Kesatu diberikan selama 3 (tiga) bulan, dengan persyaratan sebagai

berikut:

a. Memiliki KTP dan KK serta berdomisili di Kabupaten Pulau

Morotai;

b. Menandatangani Perjanjian Kontrak Bangunan Lapak.

KETIGA : Besaran stimulus bantuan dana sebagaimana dimaksud Diktum

Kesatu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diberikan selama 3

(tiga) bulan.

KEEMPAT : Segala aktifitas dalam penempatan bangunan yang telah disediakan

oleh pemerintah daerah, baik dari pihak pengguna maupun pengelola Bangunan Lapak harus berdasarkan pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Pulau Morotai (Pos Anggaran DTT Covid-19).

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 26 Juli 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya PH: KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH

NIP. 197606062011011003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 2. Wakil Bupati Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 4. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 5. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 6. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 7. Ketua Tim Cipta Lapangan Kerja Kab. Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 8. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 511.2/ /KPTS/PM/2021
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA STIMULUS BANTUAN BAGI PEDAGANG
SAYUR MASAK DI BANGUNAN LAPAK LOKASI PASAR CBD DEA
GOTALAMO KECAMATAN MOROTAI SELATAN

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS USAHA	NIK	NOMOR KK	НР	NAMA BANK DAN NO REKENING	NOMINAL (Rp)
1	Julaiha Djaguna	Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan	SAYUR MASAK	8207015802600000	8207011404100110	81380372414	BNI 899501468	1.000.000
2	Widiati Isrodin	Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan	SAYUR MASAK	8207014904750000	8207011504100030	82344515130	BRI 522301000205504	1.000.000
3	Badaria Abd.Aziz	Desa Daruba Kec. Morotai Selatan	RUJAK/ASINAN	8207014703780000	8207012811120000	81245070677	BRI 522301020246534	1.000.000
4	Nursida Albaar	Desa Muhajirin Kec. Morotai Selatan	SAYUR MASAK	8207014107890011	8207011904100099	081355106158	BRI 522301030167534	1.000.000
5	Badaria Hi. Djen Faridz Atamimi	Desa Daruba Kec. Morotai Selatan	SAYUR MASAK	8271065207730001	8207010110150008	082113531600	BRI 363601028613534	1.000.000
6	Nurhaji Bubu	Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan	SAYUR MASAK	8207014307600001	8207012004100183	081245703953	BRI 522301029706531	1.000.000
7	Suryanti Kurung	Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan	SAYUR MASAK	8207014107870006	8207011504100109	081242573932	BRI 522301029771536	1.000.000
8	Supiyati Tariwi	Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan	SAYUR MASAK	8207015809840001	8207011604100074	0000000000000	BRI 52230130266532	1.000.000
9	Emi Adam	Desa Gotalamo Kec. Morotai Selatan	SAYUR MASAK	8207017112730001	8207011504100184	0000000000000	BSI 8989070380	1.000.000
10	Fatma Badaroni	Desa Dahegila Kec. Morotai Selatan	SAYUR MASAK	8207015002780002	8207011604100080	000000000000	BRI 522301007934530	1.000.000

11	Aisa Djen Atamimi	Desa Cocomare Kec. Morotai Selatan	SAYUR MASAK	8207026710650001	8207012304100071	082349040115	BRI	
		Barat					522301006813537	1.000.000
12	Djena Rorano	Desa Darame	SAYUR MASAK	8207014107710005	8207012712120002	0000000000000	BRI	
12		Kec. Morotai Selatan					10301057679505	1.000.000
13	Isma Ibrahima	Desa Gotalamo	SAYUR MASAK	8207017007940001	8207013105180002	082262104538	BRI	
13		Kec. Morotai Selatan					522301029588535	1.000.000
TOTAL								13.000.000

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya PIL KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH NIP 197606062011011003

SETDA